

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TRIWULAN – II**



**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Provinsi Kalimantan Tengah  
Palangka Raya  
Tahun 2022**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I KINERJA</b> .....	<b>1</b>
A. Kinerja Program dan Kegiatan Substansial .....	1
<b>BAB II PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT</b> .....	<b>19</b>
A. Kendala dan Permasalahan .....	19
B. Tindak Lanjut Penyelesaian.....	19
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	<b>21</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviuw atas Laporan Kinerja, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Laporan Kinerja Triwulan II Tahun Anggaran 2022 yang berdasarkan pada Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rancangan Strategis PD Tahun 2021- 2026.

Penyusunan Laporan Kinerja ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/ sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.

Hasil capaian kinerja sasaran secara umum ada peningkatan berdasarkan pengukuran capaian kinerja dan target pada triwulan II, yang terutama dalam rencana aksi pelaksanaan kinerja. Tingkat capaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh berorientasi pada capaian visi dan misi. Capaian pada triwulan II merupakan tolak ukur dalam pencapaian kinerja. Masih ada target yang belum tercapai dan akan ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akhirnya melalui Laporan Kinerja pada Triwulan II Tahun Anggaran 2022 ini, kita harapkan agar terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja khususnya seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun - tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Palangka Raya, 25 Juli 2022

KEPALA DINAS P3APPKB  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



DINAS P3A-PPKB

dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M.Kes  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680717 199903 2 006

## BAB I KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan II tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 Triwulan II serta realisasinya.

Tingkat capaian masing-masing sasaran ditentukan oleh realisasi dari target masing-masing indikator kinerja dengan membandingkan nilai keseluruhan masing-masing indikator kinerja dengan jumlah indikator yang ada pada setiap sasaran. Tingkat capaian masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Tingkat Capaian (%)
1.	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan <ul style="list-style-type: none"><li>- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</li><li>- Persentase ARG pada belanja langsung APBD</li></ul>	100% 33%
2.	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	107,21%
3.	Meningkatkan pemenuhan Hak dan Perlindungan terhadap anak <ul style="list-style-type: none"><li>- Indeks Perlindungan Anak (IPA)</li><li>- Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif</li></ul>	100% 200,31%
4.	Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	100%
5.	Meningkatkan kualitas keluarga <ul style="list-style-type: none"><li>- Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)</li><li>- Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)</li><li>- Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)</li></ul>	89,53 93,75 105
6.	Meningkatnya akseptor KB <ul style="list-style-type: none"><li>- Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mPCR)</li><li>- Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)</li></ul>	91,39 28,24
7.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB
	<b>JUMLAH</b>	<b>95,3</b>

Tingkat capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2022	Target Capaian Triwulan II			Ket
					Target	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	81,90	81,90	82,08	100%	Bidang I
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	persen	3,43	3,43	1,13	33%	Bidang I
2	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	85 %	85 %	91,13%	107,21%	Bidang IV dan UPT-PPA
3	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	61,83	61,515	61,515	100%	Bidang III
		Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	persen	50	48	96,15	200,31%	Bidang III dan UPT-PPA
4	Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Ketersediaan Data serta Informasi DP3A tingkat Kab/Kota se-Kalimantan Tengah	Kab/Kota	6 Kab/Kota	1	1	100%	Bidang II

5	Meningkatkan kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Persen	60,32	60,32	54,01	89,53	Bidang V
		Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate/TF R per WUS usia 15-49 Tahun	2,10	2,10	2,24	93,75	Bidang V
		Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19	21	21	20	105	Bidang V
6	Meningkatnya akseptor KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mPCR)	persen	73,23	73,23	63,98	91,39	Bidang V
		Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	persen	5,36	5,36	12,55	28,24	Bidang V
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	BB	BB	BB	100 %	Sekretariat

## Program dan Kegiatan

Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri maupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan alat bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan, tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana, dan Program/kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Anggaran ( Rp )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB</b>					<b>14.829.029.000</b>
<b>A.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				14.346.269.700
<b>I.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah</b>				11.066.681.398
1.		Perencanaan. Penggangan. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			<b>230.237.850</b>
	a.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	31.245.900
	b.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5 Dokumen	23.638.100
	c.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	26.208.500

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Anggaran ( Rp )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	d.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	149.145.350
2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			<b>7.305.000.635</b>
	a.		Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN		7.233.500.635
	b.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Bulan	6.500.000
	c.		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Bulan	65.000.000
3.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			<b>10.000.000</b>
	a.		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Bulan	10.000.000
4.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			<b>49.642.000</b>
	a.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 Bulan	49.642.000
5.		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.057.924.351

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Anggaran ( Rp )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	a.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	26.504.000
	b.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	40.000.000
	c.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	35.000.000
	d.		Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang- undangan	12 Bulan	39.250.000
	e.		Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	30.000.000
	f.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	784.960.351
	g.		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Bulan	102.210.000
6.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			<b>599.469.000</b>
	a.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	12 Bulan	450.469.000
	b.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	149.000.000
7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			<b>1.724.567.562</b>

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Anggaran ( Rp )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	a.		PenyediaanJasa Surat Menyurat	12 Bulan	5.000.000
	b.		Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	533.545.162
	c.		PenyediaanJasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	1.186.022.400
8.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			<b>89.840.000</b>
	b.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		50.000.000
	c.		Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya		39.840.000
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>				<b>1.283.531.350</b>
1.		Pelembagaan Pengarusutamaa n Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi			<b>188.500.000</b>
	a		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	70.000.000

*Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah*

<b>No.</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran ( Rp )</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
	b		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	70.000.000
	c		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	48.500.000
2.		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi			<b>1.058.031.350</b>
	a		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	8 Dokumen	959.000.000
	b		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	8 Dokumen	99.031.350

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			<b>37.000.000</b>
a.			Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	<b>37.000.000</b>
<b>III</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>				<b>732.330.621</b>
1.		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			<b>382.277.000</b>
a.			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan	5 Dokumen	47.921.000

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Anggaran
					(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		
b.			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	334.356.000
2.		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			225.177.577
a.			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	134.657.577
b.			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	90.520.000
3.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			124.876.044

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Anggaran
					(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
b.			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	99.876.044
a.			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>				
1.		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			<b>74.398.750</b>
a.			Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	74.398.750
2.		Penyedia Layanan bagi keluarga Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			83.149.000

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Anggaran
					(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Provinsi		
a.			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		83.149.250
<b>V.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>				<b>218.245.000</b>
1.		Pengumpulan. Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi			218.245.000
a.			Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	7 Dokumen	67.320.000

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Anggaran
					(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
b.			Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	7 Dokumen	150.925.000
<b>VI.</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>				<b>360.341.370</b>
1.		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			189.686.650
a.			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	117.078.650
b.			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	72.608.000
2.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			170.654.720
a.			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	105.593.000
<b>VII.</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>				<b>527.592.211</b>

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Anggaran
					(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota			75.450.000
2.		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Provinsi			452.142.211
a			Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	100.902.000
b			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (DAK)	1 Dokumen	351.240.211
<b>VIII.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>				<b>198.477.300</b>
1.		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			198.477.300
a.			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	n	150.000.000 -

b.			Advokasi dan Sosialisasi GDPK	2 Dokumen	48.477.300
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>				136.994.500
1.		Pengembangan Desain Program. Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal			52.024.500
a.			Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2 Dokumen	52.024.500
b.			Pembinaan Promosi Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK dan Konseling Kesehatan Reproduksi	2 Dokumen	84.970.000

No.	Program	Kegiatan		Target	Anggaran
					(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
III	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>				<b>147.287.500</b>
1.		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			147.287.500

## **BAB II**

### **PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT**

#### **A. Kendala dan Permasalahan**

Beberapa kendala yang secara umum mempengaruhi capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan II adalah :

- a. Perubahan fungsi untuk urusan Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu adanya pelayanan diperlukan penyesuaian baik dari sisi perencanaan penganggaran hingga pelaksanaan dan evaluasi dan regulasi sebagai pendukung.
- b. Kurangnya tenaga di Dinas P3APPKB sehingga pencapaian program dan kegiatan kurang maksimal.
- c. Dengan berdirinya UPT Perlindungan Perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah diperlukan anggaran, sarana, prasarana dan tenaga profesional sehingga Pelayanan dapat berjalan maksimal
- d. Perlunya Pemahaman aparatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah terkait tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana belum menyeluruh
- e. Perlunya memperhitungkan kembali dalam penetapan Target Capaian Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif dan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif

#### **B. Tindak Lanjut Penyelesaian**

Beberapa tindak lanjut yang dapat diterapkan guna meminimalisir rendahnya capaian kinerja berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi antara lain :

- a. Dengan adanya UPT PPA ( Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ) sebagai fungsi pelayanan maksimal kepada masyarakat korban kekerasan diperlukan dukungan anggaran, Sumber Daya Manusia, Rumah Aman dan kegiatan-kegiatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Perlu diimplementasikan target kinerja yang terdapat dalam perjanjian kinerja secara berjenjang dari eselon II sampai ditingkat eselon III dan IV, fungsional tertentu dan fungsional umum, sesuai dengan pohon kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
- c. Pergub 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang memuat tugas

- pokok fungsi PD, dapat dijadikan acuan dalam menyusun SOP guna mendukung pelayanan.
- d. Dilakukan reviuw terhadap kinerja masing-masing bidang pelayanan menyangkut capaian program (*outcome*), kegiatan (*output*) yang dituangkan kedalam satu bentuk dokumen.
  - e. Membuat rencana aksi yang merupakan penjabaran target-target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja ke dalam periode bulan/triwulan/semesteran dan monitoring pencapaiannya.
  - f. Perlu dilakukan pengembangan kompetensi aparatur melalui diklat-diklat dan pelatihan teknis, memperbanyak koordinasi baik vertikal dan sektoral terkait bidang layanan.
  - g. Perlu adanya inovasi dan strategi dalam pencapaian target indikator Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
  - h. Perlu diberikannya Reward kepada Pegawai dan Pejabat yang berhasil dalam pencapaian indikator dan yang berinovasi dalam peningkatan Pencapaian dan kemajuan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.
  - i. Perlu adanya Panisemen kepada pegawai dan pejabat yang belum berhasil dalam pencapaian indikator Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun demikian berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah memberi gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana secara Keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur, masyarakat dan dunia usaha dan inovasi.

Laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah triwulan II tahun 2022 disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas dalam mendorong terwujudnya pemberdayaan perempuan, kesetaraan dan keadilan gender (KKG), terlindunginya anak dan fungsi keluarga berencana memiliki fungsi bukan sebagai pelaksana, melainkan sebagai perumus kebijakan, koordinator pelaksanaan kebijakan, advokator, fasilitator, mediator, dan inisiator. Dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak (PHA) di semua Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan lembaga masyarakat. Agar setiap Perangkat Daerah dan lembaga masyarakat tersebut dapat mengimplementasikan strategi PUG dan PHA ke dalam setiap kebijakan, program dan

kegiatannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasinya, maka tugas awal yang paling mendasar dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Dan dalam implementasinya diperlukan perubahan baik itu individu dan budaya lembaga dari yang belum memahami menjadi memahami, peduli, dan tanggap (responsif) gender, dan dari tidak peduli terhadap hak anak menjadi peduli terhadap anak.

Oleh karena itu, indikator outcome, terlebih lagi indikator dampak (*impact*) dari keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah lebih dan tidak dapat diukur dalam jangka waktu yang relatif pendek (satu tahun). Dengan adanya visi dan misinya, maka keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada hakekatnya tersebar sebagai bagian dari keberhasilan semua Perangkat Daerah dan lembaga masyarakat dalam mengintegrasikan ataupun mempertimbangkan isu gender, perempuan dan anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatannya.

Kendati proses pencapaian tujuan dan penetapan ukuran keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah bersifat kompleks, cenderung bernuansa kualitatif dan acap kali merupakan output dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*), bukan berarti kinerja PD ini tidak dapat diukur karena ada fungsi pelayanan yaitu pada Perlindungan Perempuan dan Anak dalam bentuk UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah.

Indikator outcome, terlebih lagi indikator dampak (*impact*) dari keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah lebih dan tidak dapat diukur dalam jangka waktu yang relatif pendek (satu tahun).

Dengan adanya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang tertuang dalam RENSTRA sesuai dengan perjanjian Kinerja, dimana keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada hakekatnya tersebar sebagai bagian dari keberhasilan semua Perangkat Daerah dan lembaga masyarakat dalam mengintegrasikan ataupun mempertimbangkan isu gender, perlindungan terhadap perempuan, perlindungan dan pemenuhan Hak anak, dan Pengaturan Jarak dalam Keluarga Berencana dalam menurunkan STUNTING, Perkawinan Usia Anak dan ke dalam kebijakan, program dan kegiatannya di Provinsi Kalimantan Tengah.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Instansi pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab dan amanah untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Bappedalitbang dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian rincian tugas, fungsi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berlandaskan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dalam RPJMD 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan tujuan Renstra PD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026. Dimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja antara Gubernur Kalimantan Tengah dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas dalam mendorong terwujudnya pemberdayaan perempuan, kesetaraan dan keadilan gender (KKG), terlindunginya anak dan fungsi keluarga berencana memiliki fungsi bukan sebagai pelaksana, melainkan sebagai perumus kebijakan, koordinator pelaksanaan kebijakan, advokator, fasilitator, mediator, dan inisiator. Dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak (PHA) di semua Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan lembaga masyarakat. Agar setiap Perangkat Daerah dan lembaga masyarakat tersebut dapat mengimplementasikan strategi PUG dan PHA ke dalam setiap kebijakan, program dan kegiatannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasinya, maka tugas awal yang paling mendasar dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Dan dalam implementasinya diperlukan perubahan baik itu individu dan budaya lembaga dari yang belum memahami menjadi memahami, peduli, dan tanggap (responsif) gender, dan dari tidak peduli terhadap hak anak menjadi peduli terhadap anak.

Dari hasil pelaksanaan dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah perlu upaya –

upaya dalam pencapaian keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya.

Terkait beberapa kendala dan kekurangan dalam pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah maka beberapa rekomendasi yang dapat disarankan untuk ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan anggaran perlu dilakukan secara selektif (hanya Program/Kegiatan terkait kinerja PD yang menjadi prioritas) sehingga tidak menghambat pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian target.
2. Perlunya Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan menyangkut Program kegiatan terkait kinerja.
3. Perlunya Penambahan SDM untuk mengisi kekosongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah
4. Mengingat kurangnya data sektoral terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah baik data primer maupun data sekunder maka perlu dilakukan inventarisasi dan survei data terkait kinerja PD terutama dari program kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mempermudah pengukuran hasil kinerja dan perencanaan kinerja kedepannya.
5. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan. Untuk itu perlu adanya perencanaan terhadap pemenuhan kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang.
6. Perlu memperkuat UPT Perlindungan Perempuan dan anak di Propinsi Kalimantan Tengah, dalam sarana, prasarana dan tenaga yang berkompeten sehingga pelayanan yang dilaksanakan dapat maksimal. Perlu adanya Promosi dan informasi dalam menginformasikan telah adanya tempat Perlindungan perempuan dan anak di Propinsi Kalimantan Tengah, yang juga melakukan pelayanan via Hotline kepada Masyarakat.
7. Perlunya pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui keluarga dalam penurunan angka STUNTING dan Perkawinan Usia Anak dalam mengatur jarak Kehamilan dengan Keluarga berencana.

Palangka Raya, 25 Juli 2022

  
DINAS P3A-PPKB  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes  
Kepala Dinas Tingkat I  
NIP. 19680717 199903 2 006

**DOKUMENTASI  
RAPAT TRIWULAN II**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**





# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Brigjen Katamso No. 11 Telp. 0536 - 3224547 dan E-mail Kantor : [dp3appkb@kalteng.go.id](mailto:dp3appkb@kalteng.go.id)  
PALANGKA RAYA 73112

## A. Target Realisasi Kinerja Tahunan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Waktu Pelaksanaan				Ket
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	81,90	81,90	81,90	81,90	81,90	Bidang I IDG = $\frac{(I(\text{par}) + I(\text{DM}) + I(\text{inc-dis}))}{3}$ Kontribusi Komponen Keterwakilan di parlemen, pengambil keputusan dan distribusi pendapatan
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	persen	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	Bidang I <b>Rumus Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD = <math>\frac{\text{Anggaran Belanja Langsung (Operasi dan modal) APBD dalam GBS di bagi Anggaran Belanja Langsung (Operasi dan modal) APBD dikalikan 100 \% = 35.196.877.863}{3.131.184.116.124} = 0,011240 \times 100 \% = 1,12 \%</math></b>
2	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	Bidang IV dan UPT-PPA (Semakin Besar Persentase Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Semakin Bagus) Sumber Data : Simfoni PPA Kementerian PPPA RI
3	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	61,83	61,515	61,62	61,725	61,83	Bidang III Pelayanan UPT Optimal
		Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	persen	50%	46%	48%	49%	50	Bidang III dan UPT-PPA

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan		Waktu Pelaksanaan				Ket
4	Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Ketersediaan Data serta Informasi DP3A tingkat Kab/Kota se-Kalimantan Tengah	Kab/Kota	6 Kab/ Kota	1	1	2	6	Bidang II Target 6 kab/kota di Triwulan IV setelah Rakor Forum Data se Kalteng, direncanakan pada bulan Juni 2022
5	Meningkatkan kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Persen	60,32	60,32	60,32	60,32	60,32	Target Ibangga Th 2021 55,00 Capaian Ibangga Th 2021 54,01 Sumber Data PK 21 Perwakilan BKKBN Bidang V
		Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate/TFR per WUS usia 15-49 Tahun	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	Target TFR Th 2021 2,24 Capaian TFR Th 2021 2,24 (semakin kecil semakin bagus) Sumber SDKI 2017 Bidang V
		Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19	21	21	21	21	21	Target ASFR Th 2021 24 Capaian ASFR Th 2021 20 (semakin kecil semakin bagus) Sumber SDKI 2017 Bidang V
6	Meningkatnya akseptor KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mPCR)	persen	73,23	73,23	73,23	73,23	73,23	Target mCPR th 2021 62,16 persen Capaian mCPR th 2021 57,00 persen Data PK 21 Perwakilan BKKBN Kalteng Bidang V
		Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	persen	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	Target Unmeet need th 2021 8,30 persen Capaian th 2021 18 persen (semakin kecil semakin bagus) Data PK 21 Perwakilan BKKBN Kalteng Bidang V
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	BB	BB	BB	BB	BB	Sekretariat

## B. Target Realisasi Kinerja Triwulan II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2022	Target Capaian Triwulan II			Ket
					Target	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	81,90	81,90	82,08	100%	Bidang I IDG = $\frac{I(\text{par}) + I(\text{DM}) + I(\text{inc-dis})}{3}$ Kontribusi Komponen Keterwakilan di parlemen, pengambil keputusan dan distribusi pendapatan
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	persen	3,43	3,43	1,13	33%	Bidang I <b>Rumus Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD = <math>\frac{\text{Anggaran Belanja Langsung (Operasi dan modal) APBD dalam GBS di bagi Anggaran Belanja Langsung (Operasi dan modal) APBD}}{\text{dikalikan 100 \%}}</math></b> <b>= <u>35.196.877.863</u></b> 3.131.184.116.124 = 0,011240 x 100 % = 1,12 %
2	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	85 %	85 %	91,13%	107,21%	Bidang IV dan UPT-PPA (Semakin Besar Persentase Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Semakin Bagus) Sumber Data : Simfoni PPA Kementerian PPPA RI
3	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	61,83	61,515	61,515	100%	Bidang III
		Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	persen	50	48	96,15	200,31%	Bidang III dan UPT-PPA Pelayanan UPT Optimal

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2022	Target Capaian Triwulan II			Ket
					Target	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	81,90	81,90	82,08	100%	Bidang I $IDG = \frac{I(\text{par}) + I(\text{DM}) + I(\text{inc-dis})}{3}$ Kontribusi Komponen Keterwakilan di parlemen, pengambil keputusan dan distribusi pendapatan
4	Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Ketersediaan Data serta Informasi DP3A tingkat Kab/Kota se-Kalimantan Tengah	Kab/Kota	6 Kab/Kota	1	1	100%	Bidang II Target 6 kab/kota di Triwulan IV setelah Rakor Forum Data se Kalteng, direncanakan pada bulan Juni 2022
5	Meningkatkan kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Persen	60,32 (Indeks Pembangunan Keluarga)	60,32	54,01	89,53%	Target Ibangga Th 2021 55,00 Capaian Ibangga Th 2021 54,01 Sumber Data PK 21 Perwakilan BKKBN Bidang V
		Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate/TFR per WUS usia 15-49 Tahun	2,10/Rata-rata anak per wanita	2,10	2,24	93,75	Target TFR Th 2021 2,24 Capaian TFR Th 2021 2,24 (semakin kecil semakin bagus) Sumber SDKI 2017 Bidang V
		Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19	21/ kelahiran per 1000 wanita usia 15-29	21	20	105	Target ASFR Th 2021 24 Capaian ASFR Th 2021 20 (semakin kecil semakin bagus) Sumber SDKI 2017 Bidang V

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2022	Target Capaian Triwulan II			Ket
					Target	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	81,90	81,90	82,08	100%	Bidang I $IDG = \frac{I(\text{par}) + I(\text{DM}) + I(\text{inc-dis})}{3}$ Kontribusi Komponen Keterwakilan di parlemen, pengambil keputusan dan distribusi pendapatan
6	Meningkatnya akseptor KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mPCR)	persen	73,23	73,23	63,98	91,39%	Target mCPR th 2021 62,16 persen Capaian mCPR th 2021 57,00 persen Data PK 21 Perwakilan BKKBN Kalteng Bidang V
		Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	persen	5,36	5,36	12,55	28,24%	Target Unmeet need th 2021 8,30 persen Capaian th 2021 18 persen (semakin kecil semakin bagus) Data PK 21 Perwakilan BKKBN Kalteng Bidang V
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	BB	BB	BB	100 %	Sekretariat

**C. Target Realisasi Keuangan Triwulan II**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi				BTL/BL	LOKASI	Ket
			Keuangan		Fisik				
			Rp	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB</b>	<b>14.829.029.000</b>	<b>1.507.824.099</b>	<b>10,17</b>	<b>1.785.062.349</b>	<b>12,04</b>			
<b>A</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>14.829.029.000</b>	<b>1.507.824.099</b>	<b>10,17</b>	<b>1.785.062.349</b>	<b>12,04</b>			
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>11.066.681.398</b>	<b>1.324.613.399</b>	<b>11,97</b>	<b>1.324.613.399</b>	<b>11,97</b>			
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>230.237.850</b>	<b>16.639.100</b>	<b>7,23</b>	<b>16.639.100</b>	<b>7,23</b>			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.245.900	4.094.000	13,10	4.094.000	13,10			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23.638.100	4.236.000	17,92	4.236.000	17,92			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.208.500	5.145.500	19,63	5.145.500	19,63			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.145.350	3.163.600	2,12	3.163.600	2,12			
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.305.000.635</b>	<b>895.470.778</b>	<b>12,26</b>	<b>895.470.778</b>	<b>12,26</b>			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.233.500.635	878.984.378	12,15	878.984.378	12,15			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000	6.500.000	100,00	6.500.000	100,00			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	65.000.000	9.986.400	15,36	9.986.400	15,36			
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	-	0,00	-	0,00			
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>49.642.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	49.642.000	-	0,00	-	0,00			
<b>1.5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.057.924.351</b>	<b>83.208.500</b>	<b>7,87</b>	<b>83.208.500</b>	<b>7,87</b>			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.504.000	4.400.000	16,60	4.400.000	16,60			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000	4.998.500	12,50	4.998.500	12,50			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi				BTL/ BL	LOKASI	Ket
			Keuangan		Fisik				
			Rp	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000	8.730.000	24,94	8.730.000	24,94			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39.250.000	195.000	0,50	195.000	0,50			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	7.000.000	23,33	7.000.000	23,33			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	784.960.351	57.885.000	7,37	57.885.000	7,37			
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	102.210.000	-	0,00	-	0,00			
<b>1.6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>599.469.000</b>	<b>199.200.000</b>	<b>33,23</b>	<b>199.200.000</b>	<b>33,23</b>			
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	450.469.000	199.200.000	44,22	199.200.000	44,22			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	149.000.000	-	0,00	-	0,00			
<b>1.7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.724.567.562</b>	<b>122.729.021</b>	<b>7,12</b>	<b>122.729.021</b>	<b>7,12</b>			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	1.200.000	24,00	1.200.000	24,00			
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	533.545.162	13.711.021	2,57	13.711.021	2,57			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.186.022.400	107.818.000	9,09	107.818.000	9,09			
<b>1.8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>89.840.000</b>	<b>7.366.000</b>	<b>8,20</b>	<b>7.366.000</b>	<b>8,20</b>			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	3.796.000	7,59	3.796.000	7,59			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.840.000	3.570.000	8,96	3.570.000	8,96			
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>1.283.531.350</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			
<b>2.1</b>	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>	<b>188.500.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	70.000.000	-	0,00	-	0,00			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	70.000.000	-	0,00	-	0,00			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi				BTL/ BL	LOKASI	Ket
			Keuangan		Fisik				
			Rp	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	48.500.000	-	0,00	-	0,00			
<b>2.2</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi</b>	<b>1.058.031.350</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>			
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	959.000.000	-	0,00	-	0,00			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	99.031.350	-	0,00	-	0,00			
<b>2.3</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>37.000.000</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>			
	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	37.000.000	-	0,00	-	0,00			
<b>3</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>732.330.621</b>	<b>66.849.750</b>	<b>9,13</b>	<b>281.198.500</b>	<b>38,40</b>			
<b>3.1</b>	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>382.277.000</b>	<b>45.007.250</b>	<b>11,77</b>	<b>259.356.000</b>	<b>67,85</b>			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	47.921.000	8.980.000	18,74	25.000.000	52,17			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	334.356.000	36.027.250	10,78	234.356.000	70,09			
<b>3.2</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>225.177.577</b>	<b>21.842.500</b>	<b>9,70</b>	<b>21.842.500</b>	<b>9,70</b>			
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	134.657.577	8.392.500	6,23	8.392.500	6,23			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi				BTL/ BL	LOKASI	Ket
			Keuangan		Fisik				
			Rp	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
	Kabupaten/Kota								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	90.520.000	13.450.000	14,86	13.450.000	14,86			
<b>3.3</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>124.876.044</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	99.876.044	-	0,00	-	0,00			
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	25.000.000	-	0,00	-	0,00			
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>157.547.750</b>	<b>53.994.250</b>	<b>34,27</b>	<b>74.398.750</b>	<b>47,22</b>			
<b>4.1</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>74.398.750</b>	<b>53.994.250</b>	<b>72,57</b>	<b>74.398.750</b>	<b>100,00</b>			
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	74.398.750	53.994.250	72,57	74.398.750	100,00			
<b>4.3</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>83.149.000</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>			
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	83.149.000	-	0,00	-	0,00			
<b>5.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>218.245.000</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>218.245.000</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi				BTL/ BL	LOKASI	Ket
			Keuangan		Fisik				
			Rp	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	67.320.000	-	0,00	-	0,00			
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	150.925.000	-	0,00	-	0,00			
<b>6</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>360.341.370</b>	<b>49.380.000</b>	<b>13,70</b>	<b>49.380.000</b>	<b>13,70</b>			
<b>6.1</b>	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>	<b>189.686.650</b>	<b>49.380.000</b>	<b>26,03</b>	<b>49.380.000</b>	<b>26,03</b>			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga	117.078.650	49.380.000	42,18	49.380.000	42,18			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	72.608.000	-	0,00	-	0,00			
<b>6.2</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>170.654.720</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	105.593.000	-	0,00	-	0,00			
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	65.061.720	-		-				
<b>7</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>527.592.211</b>	<b>12.986.700</b>	<b>2,46</b>	<b>12.986.700</b>	<b>2,46</b>			
<b>7.1</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>75.450.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi	75.450.000	-	0,00	-	0,00			
<b>7.2</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>452.142.211</b>	<b>12.986.700</b>	<b>2,87</b>	<b>12.986.700</b>	<b>2,87</b>			
	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	100.902.000	12.986.700	12,87	12.986.700	12,87			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi				BTL/ BL	LOKASI	Ket
			Keuangan		Fisik				
			Rp	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (DAK)	351.240.211	-	0,00	-	0,00			
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>198.477.300</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>			
<b>8.1</b>	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>198.477.300</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>			
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	150.000.000	-	0,00	-	0,00			
	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	48.477.300	-	0,00	-	0,00			
<b>9</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>136.994.500</b>	-	<b>0,00</b>	<b>42.485.000</b>	<b>31,01</b>			
<b>9.1</b>	<b>Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>52.024.500</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>			
	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	52.024.500	-	0,00	-	0,00			
<b>9.2</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>84.970.000</b>	-	<b>0,00</b>	<b>42.485.000</b>	<b>50,00</b>			
	Pembinaan Promosi Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPk dan Konseling Kesehatan Reproduksi	84.970.000	-	0,00	42.485.000	50,00			
<b>10</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN</b>	<b>147.287.500</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi				BTL/ BL	LOKASI	Ket
			Keuangan		Fisik				
			Rp	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
	<b>PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>								
10.1	<b>Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	147.287.500	-	0,00	-	0,00			
	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	147.287.500	-	0,00	-	0,00			
	<b>TOTAL</b>	14.829.029.000	-	0,00	-	0,00			

KEPALA DINAS P3APPKB  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M.Kes  
Rebina Tingkat I  
NIP. 19680717 199903 2 006